

MODUL – 6 DINAMIKA KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN, DAN PROGRAM KB

Dinamika Kependudukan, Pembangunan, dan Program KB



Tim Penyusun:

Omas Bulan Samosir, Ph.D

Rihlah Romdoniah, S.E.

Israul Hasanah, S.E.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Modul Konsep dan Ukuran Fertilitas telah tersusun. Sehingga Modul “Dinamika Kependudukan, Pembangunan, dan Program KB” dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta yang tergabung dalam Diklat Teknis Dasar-Dasar Demografi bagi ASN BKKBN, PLKB/PKB, Mitra kerja, maupun Motivator.

Dengan adanya misi BKKBN dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan maka semua pegawai BKKBN baik di pusat dan daerah harus memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar demografi.

Modul ini masih perlu dikembangkan oleh masing-masing pengguna dan ditindak lanjuti melalui praktek langsung di lapangan dalam memenuhi kebutuhan operasional serta dari sumber kepustakaan. Saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan bahan ajar sangatlah kami harapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat kepada setiap peserta ajar dan pembacanya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Deskripsi Singkat.....	14
C. Manfaat Modul bagi Peserta	14
D. Tujuan Pembelajaran	14
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	15
F. Petunjuk Belajar	16
BAB II DINAMIKA KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN, DAN PROGRAM KB	17
A. Dinamika Kependudukan dan Pendidikan	17
B. Dinamika Kependudukan dan Ekonomi	19
C. Dinamika Kependudukan dan Kesehatan.....	24
D. Dinamika Kependudukan dan Program KB	28
E. Latihan	30
F. Rangkuman.....	31
G. Evaluasi.....	32
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	36
BAB III PROGRAM KB DAN PEMBANGUNAN	37
A. Program KB dan Pendidikan	37
B. Program KB dan Ekonomi	38

C. Program KB dan Kesehatan	42
D. Latihan	44
E. Rangkuman.....	45
F. Evaluasi.....	45
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	49
BAB IV PENUTUP	50
A. Rangkuman.....	50
B. Evaluasi.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dimana setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan tanpa memandang umur, jenis kelamin, lokasi geografis, latar belakang budaya, dan keyakinan serta kondisi kesulitan fungsional. Hal ini antara lain dapat dicirikan dengan kondisi penduduk yang bebas dari kemiskinan, sehat, terdidik, cukup pangan dan gizi, memiliki akses air minum yang aman dan sanitasi bersih, cukup energi, mempunyai pekerjaan dan kehidupan yang baik dan layak, hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman, memiliki pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta hidup dalam komunitas yang stabil dan damai. Pencapaian peningkatan kesejahteraan manusia, baik manusia generasi sekarang maupun manusia generasi yang akan datang, memerlukan upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan dimana ada keseimbangan yang harmonis antara tiga pilar pembangunan – pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan – dengan

penekanan pada pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Akan tetapi, ketimpangan dalam pencapaian pembangunan antar negara masih tetap terjadi dimana beberapa negara-negara lebih baik dalam menterjemahkan pertumbuhan ekonomi ke dalam pencapaian pembangunan sosial yang lebih baik melalui belanja publik yang lebih besar khususnya untuk pendidikan dasar dan kesehatan daripada untuk angkatan bersenjata. Selain itu, perbedaan dalam faktor-faktor demografi, termasuk pertumbuhan penduduk, telah dianggap sebagai penyebab ketimpangan dalam pencapaian pembangunan sosial. Konsep pembangunan kemudian diperluas lagi dengan menekankan perumusan kebijakan dan program pembangunan yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara dinamika kependudukan dan pembangunan. Artinya, tujuan dan kebijakan kependudukan harus dipandang sebagai bagian terpadu dari pembangunan sosial, ekonomi dan budaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk (House 1995).

Hingga tahun 1970-an konsep pembangunan lebih ditekankan kepada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan produk nasional bruto (*gross national product*/GNP) per kapita

sebagai indikator pencapaian pembangunan. Akan tetapi, peningkatan pendapatan nasional tidak selalu berarti terselesaikannya permasalahan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Bahkan, pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi dapat menjadi penyebab timbulnya persoalan-persoalan pembangunan. Sebagai contoh, revolusi industri di Eropa telah mengakibatkan terjadinya urbanisasi yang pesat serta persoalan-persoalan sosial yang menyertainya. Industrialisasi selanjutnya juga telah mengakibatkan polusi dan degradasi lingkungan. Konsep pembangunan kemudian diperluas dengan memasukkan pembangunan sosial yang kemudian diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Pencapaian pembangunan di suatu negara kemudian diukur dengan tingkat kecukupan makanan serta barang dan jasa dasar lainnya yang di atas garis kemiskinan, kesempatan kerja produktif yang membebaskan seseorang dari kemiskinan, distribusi pendapatan yang merata, tingkat pendidikan yang memadai, keamanan pangan dan gizi, mortalitas, harapan hidup dan morbiditas, akses terhadap semua layanan sosial, seperti kesehatan, air bersih, sanitasi, transportasi dan perumahan, serta pemberdayaan perempuan.

Konsep pembangunan yang memperhitungkan dinamika kependudukan dikenal juga sebagai pembangunan berwawasan kependudukan atau berpusatkan penduduk. BKKBN (2012) mengajukan sebanyak delapan aspek strategis pembangunan berwawasan kependudukan. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Artinya, penduduk merupakan sumber daya utama pembangunan dan pembangunan ditujukan untuk penduduk. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang berdasarkan situasi penduduk (*population-responsive*). Artinya, kebijakan dan program pembangunan harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan semua kelompok penduduk – muda dan tua, laki-laki dan perempuan, anak usia bawah lima tahun dan remaja, perempuan usia reproduksi dan perempuan yang sudah menopause, yang sehat dan yang sakit, yang hidup dan yang meninggal, yang tinggal di perdesaan dan yang tinggal di perkotaan, yang belum sekolah dan yang sekolah, yang bekerja dan yang tidak bekerja, kepala rumah tangga laki-laki dan kepala rumah tangga perempuan, kepala rumah tangga usia lanjut, ibu remaja, pekerja anak, yang tidak mempunyai

kesulitan fungsional dan yang mempunyai kesulitan fungsional, yang tinggal di wilayah yang mudah dijangkau dan yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau, masyarakat adat, suku terasing, penduduk lokal dan pendatang serta warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dalam konteks ini penguatan data dan informasi kependudukan harus ditingkatkan agar tersedia informasi jumlah, struktur umur dan jenis kelamin, persebaran spasial, tingkat kelahiran, kematian dan migrasi, serta kualitas sumber daya manusia penduduk agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan. Selain itu, landasan hukum dan kelembagaan kependudukan juga harus diharmonisasi dan disinergikan supaya pembangunan berwawasan kependudukan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pada tahun 2015 pemerintah negara-negara di dunia menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) 2015–2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Ketujuh belas SDGs meliputi (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan

terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Komitmen pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 yang dibagi menjadi empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 2005–2009, 2010–2014, 2015–2019, dan 2020–2024. Pada tingkat sub-nasional, provinsi dan kabupaten/kota, komitmen pembangunan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinamika kependudukan (*population dynamics*) adalah perubahan yang terjadi pada luaran demografis/*demographic outcomes* (jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta struktur penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan persebaran spasial penduduk) yang disebabkan karena proses demografis/*demographic process* (kelahiran, kematian, dan

perpindahan). Dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB memiliki hubungan timbal balik yang erat. Dinamika kependudukan merupakan determinan dan konsekuensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Gambar 1.1). Artinya, situasi dinamika kependudukan menentukan pencapaian pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebaliknya, pencapaian pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan berdampak pada situasi dinamika kependudukan.

Dinamika kependudukan dapat berimplikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pembangunan ekonomi, pasar kerja, distribusi pendapatan, kemiskinan, dan perlindungan sosial, termasuk pensiun dan perluasan sektor jasa *care-giver* (*care-giving*). Dinamika kependudukan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, perubahan iklim, serta keamanan pangan, air dan energi. Dinamika kependudukan juga berdampak pada kemampuan dan kapasitas kita untuk menjamin akses menyeluruh terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan layanan penting lainnya. Keterkaitan antara dinamika kependudukan dan tantangan pembangunan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hak-

hak dan peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Hal ini ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025¹ dan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (UN 1995). Dalam RPJPN disebutkan bahwa “kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.”

Oleh karena itu, pengelolaan dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB merupakan suatu kebijakan pembangunan yang penting untuk meningkatkan pencapaian pembangunan. Pemahaman yang tepat mengenai keterkaitan antara dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB merupakan salah satu faktor kunci untuk penyusunan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

kebijakan dan pengambilan keputusan terkait kependudukan dan KB.

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Hubungan antara Dinamika Kependudukan, Pembangunan, dan Program Keluarga Berencana



Sumber: House (1995) (Dimodifikasi oleh Penulis).

B. Deskripsi Singkat

Dalam modul ini dibahas keterkaitan antara dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB.

C. Manfaat Modul bagi Peserta

Manfaat modul bagi peserta adalah sebagai bahan ajar dalam mata Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar-Dasar Demografi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dapat mengerti dan memahami istilah-istilah dalam mortalitas dan kaitannya dengan pembangunan dan Program KKBPK yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini Anda diharapkan mampu memahami keterkaitan dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari materi ini Anda dapat

- menjelaskan konsep dinamika kependudukan;
- menjelaskan konsep pembangunan;
- menjelaskan keterkaitan antara dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB;
- menjelaskan keterkaitan antara program KB dan pembangunan.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

I. Kependudukan dan Pembangunan

1. Kependudukan dan pendidikan
2. Kependudukan dan ekonomi
3. Kependudukan dan kesehatan
4. Kependudukan dan program KB

II. Program KB dan Pembangunan

1. Program KB dan pendidikan
2. Program KB dan ekonomi
3. Program KB dan kesehatan

F. Petunjuk Belajar

1. Bacalah dengan seksama indikator keberhasilan setiap bab karena indikator keberhasilan merupakan tolok ukur keberhasilan Anda dalam belajar.
2. Bacalah materi yang diberikan oleh Widyaiswara secara berurutan dengan seksama. Tanyakan apabila ada yang kurang dimengerti.
3. Diskusikan dengan teman-teman Anda bila ada masalah dalam penyusunan ataupun pengusulan angka kredit.
4. Kerjakan soal-soal latihan yang diberikan untuk mengukur kemampuan Anda.
5. Jangan melihat kunci jawaban terlebih dahulu sebelum Anda mengerjakan soal-soal latihan.
6. Untuk memperkaya pengetahuan carilah informasi dari sumber-sumber lain yang relevan.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam Mata Diklat Dasar-Dasar Demografi ini dan dapat melaksanakan tugas sehari-hari anda sebagai seorang ASN BKKBN secara lebih baik lagi.

BAB II

DINAMIKA KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN, DAN PROGRAM KB

Indikator keberhasilan: Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menjelaskan keterkaitan dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB.

A. Dinamika Kependudukan dan Pendidikan

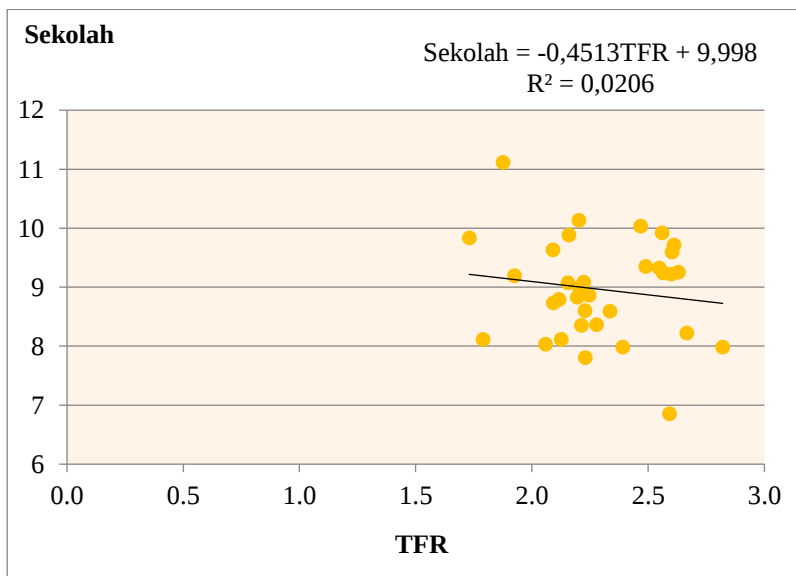
Tingkat kelahiran yang tinggi menghambat peningkatan kesejahteraan sosial termasuk pendidikan. Pencapaian pendidikan secara umum lebih rendah di wilayah-wilayah dengan tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.1, di Indonesia, semakin tinggi tingkat kelahiran di suatu provinsi, semakin pendek lama sekolah rata-ratanya. Peningkatan dalam TFR sebesar 1 anak per perempuan berhubungan dengan penurunan lama sekolah rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 0,45 tahun. Jadi, penurunan TFR penting untuk peningkatan lama sekolah penduduk.

Tingkat kelahiran yang tinggi juga berhubungan dengan partisipasi sekolah yang lebih rendah. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.2, di Indonesia, semakin tinggi tingkat

kelahiran di suatu provinsi, semakin rendah angka partisipasi murni sekolah menengahnya. Peningkatan dalam TFR sebesar 1 anak per perempuan berhubungan dengan penurunan angka partisipasi murni sekolah menengah sebesar 3,32. Jadi, penurunan TFR penting untuk peningkatan partisipasi sekolah penduduk.

Gambar 2.1

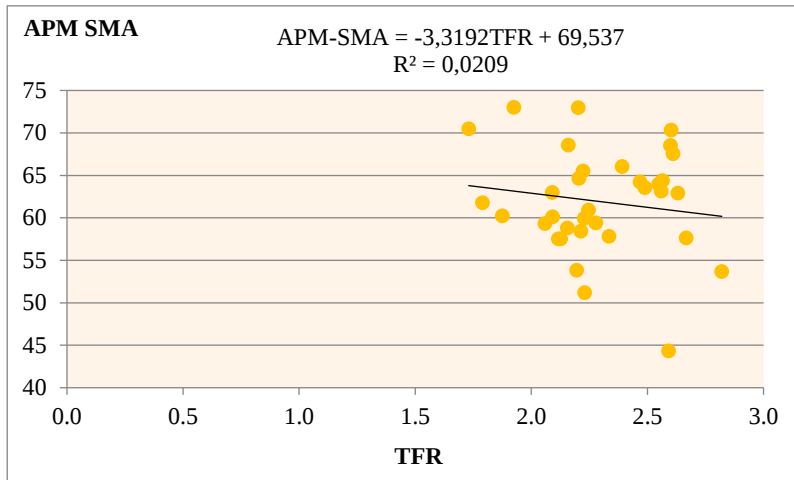
Angka fertilitas total (TFR) 2015 dan lama sekolah rata-rata (Sekolah) 2019 menurut provinsi Indonesia



Sumber: Bappenas dkk (2018) dan www.bps.go.id (Diolah oleh Penulis).

Gambar 2.2

Angka fertilitas total (TFR) 2015 dan angka partisipasi murni (APM SMA) 2019 menurut provinsi Indonesia



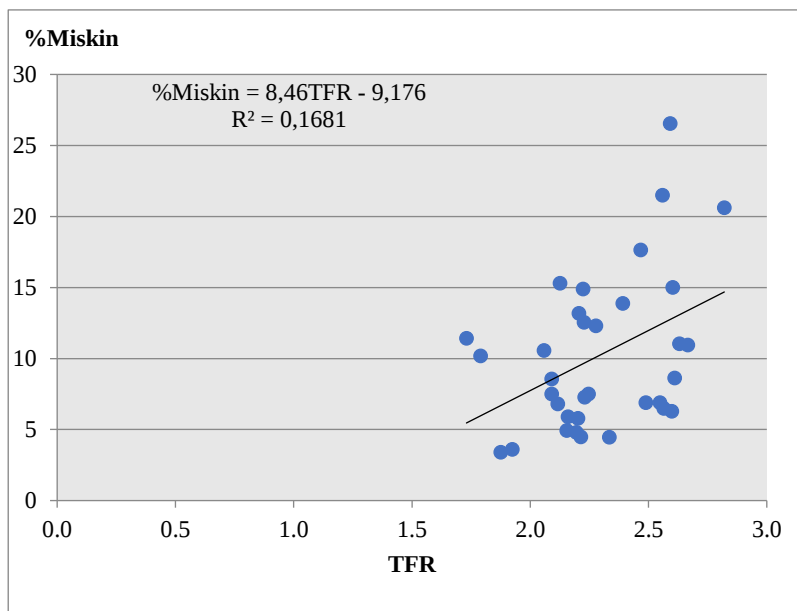
Sumber: Bappenas dkk (2018) dan www.bps.go.id (Diolah oleh Penulis).

B. Dinamika Kependudukan dan Ekonomi

Tingkat kelahiran yang tinggi dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.3, di Indonesia, semakin tinggi tingkat kelahiran di suatu provinsi, semakin tinggi persentase penduduk miskinnya. Peningkatan dalam TFR sebesar 1 anak per perempuan

berhubungan dengan kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 8,46. Jadi, penurunan TFR penting untuk pengentasan kemiskinan.

Gambar 2.3
Angka fertilitas total (TFR) 2015 dan persentase penduduk miskin (%Miskin) 2019 menurut provinsi Indonesia

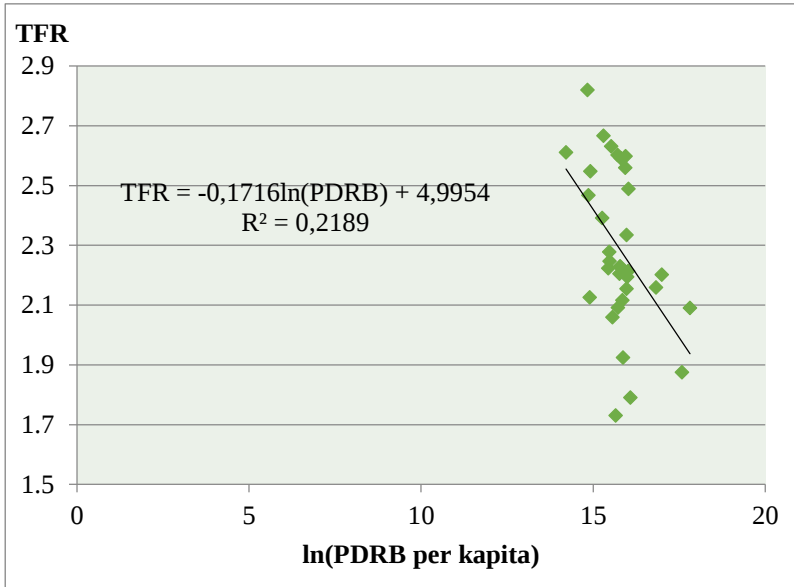


Sumber: Bappenas dkk (2018) dan www.bps.go.id (Diolah oleh Penulis).

Pembangunan ekonomi memiliki dampak positif terhadap penurunan fertilitas. Pembangunan ekonomi meningkatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan formal bagi perempuan sehingga menurunkan tingkat kelahiran. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.4, di Indonesia, semakin tinggi pembangunan ekonomi di suatu provinsi, semakin rendah tingkat kelahirannya. Kenaikan angka pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen ($\ln(\text{produk domestik regional bruto/PDRB atas dasar harga konstan per kapita})$) sebesar 1% akan menurunkan TFR sebesar 0,17 anak per perempuan atau 17 anak per 100 perempuan. Jadi, pembangunan ekonomi penting untuk penurunan tingkat kelahiran.

Gambar 2.4

Angka pertumbuhan ekonomi 2011 dan Angka fertilitas total (TFR) 2015 menurut provinsi Indonesia

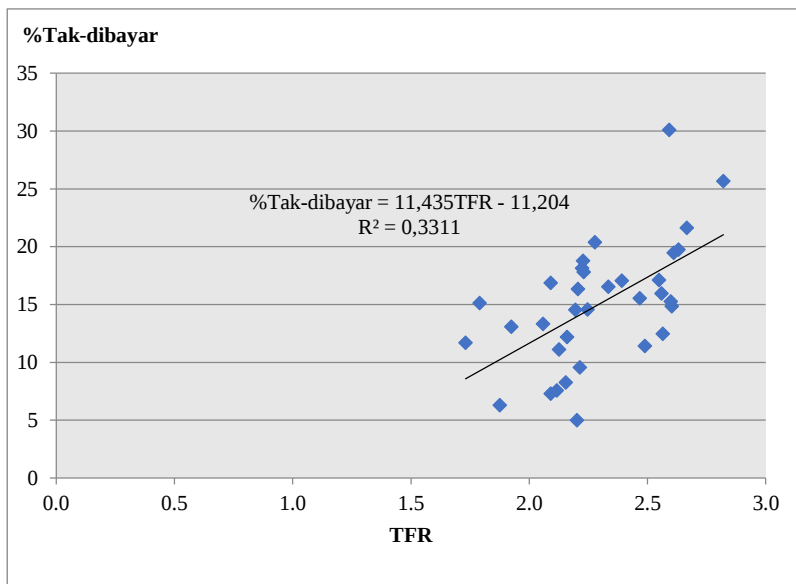


Sumber: INDODAPOER (databank.worldbank.org) dan Bappenas (2018) (Diolah oleh Penulis).

Tingkat kelahiran yang tinggi dapat menghambat akses terhadap pekerjaan yang dibayar (remuneratif). Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.5, di Indonesia, semakin tinggi tingkat kelahiran di suatu provinsi, semakin tinggi persentase pekerja keluarga/tidak dibayar. Peningkatan dalam TFR sebesar 1 anak per perempuan berhubungan dengan kenaikan

persentase pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 11,4%. Jadi, penurunan TFR penting untuk peningkatan akses terhadap pekerjaan yang dibayar.

Gambar 2.5
Angka fertilitas total (TFR) 2015 dan persentase pekerja
keluarga/tidak dibayar (%Tak-dibayar) 2019 menurut
provinsi Indonesia



Sumber: Bappenas dkk (2018) dan BPS (2019) (Diolah oleh Penulis).

C. Dinamika Kependudukan dan Kesehatan

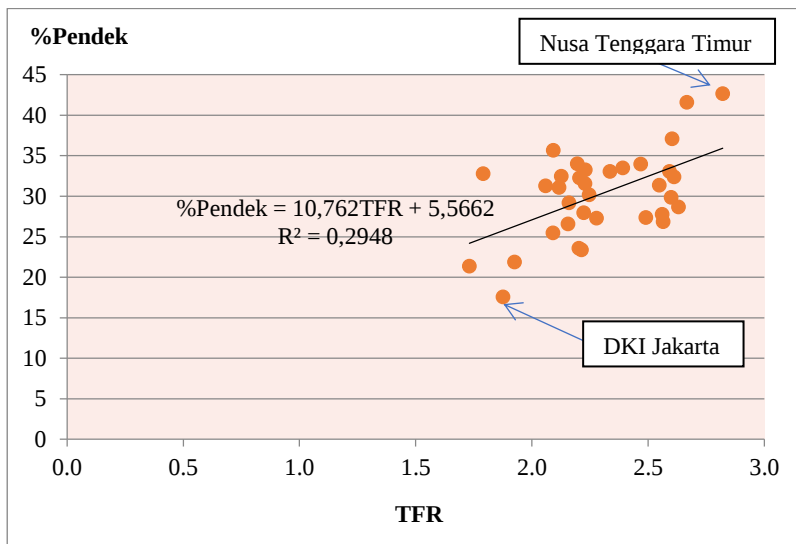
Tingkat kelahiran yang tinggi dapat membatasi kemampuan keluarga untuk memberikan gizi yang terbaik kepada anak usia bawah lima tahun (balita) sehingga dapat meningkatkan kejadian *stunting*. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.6, di Indonesia, semakin tinggi tingkat kelahiran di suatu provinsi, semakin tinggi persentase anak usia balita pendek (*stunted*). Peningkatan dalam TFR sebesar 1 anak per perempuan berhubungan dengan kenaikan persentase anak usia balita pendek sebesar 10,8%. Jadi, penurunan TFR penting untuk penurunan kejadian *stunting*.

Dinamika kependudukan, khususnya transisi demografi penuaan penduduk (*population ageing*), berhubungan dengan pandemi COVID-19. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.7, di Indonesia, semakin tinggi persentase penduduk usia 65 tahun ke atas di suatu provinsi, semakin tinggi angka fatalitas kasus (*case fatality rate*/CFR) COVID-19. Peningkatan dalam persentase penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 1% berhubungan dengan kenaikan CFR COVID-19 sebesar 2,7%. Jadi, pemahaman transisi demografi penuaan penduduk penting untuk penanganan wabah COVID-19 pada masa yang

akan datang melalui pemenuhan kebutuhan perlindungan sosial, khususnya kesehatan, bagi penduduk usia lanjut.

Gambar 2.6

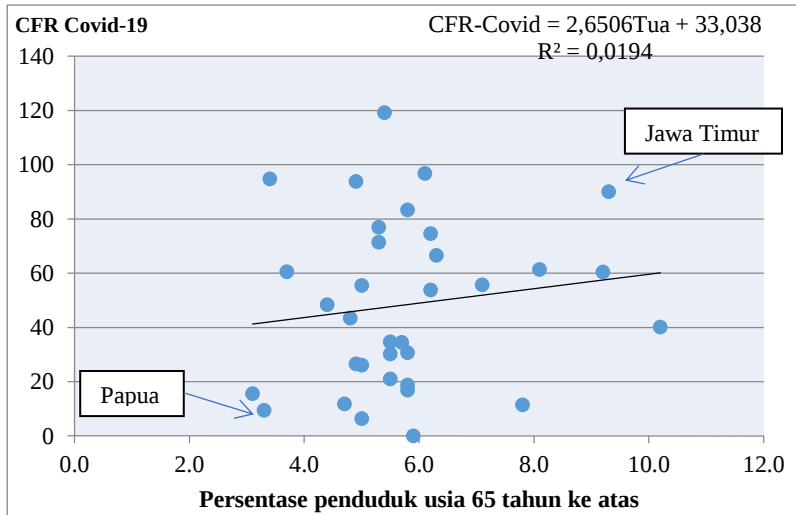
Angka fertilitas total (TFR) 2015 dan persentase anak usia balita pendek (%Pendek) 2018 menurut provinsi Indonesia



Sumber: Bappenas dkk (2018) dan Kementerian Kesehatan (2018) (Diolah oleh Penulis).

Gambar 2.7

Persentase penduduk usia 65 tahun ke atas (Tua) dan angka fatalitas kasus (CFR) COVID-19 menurut provinsi Indonesia



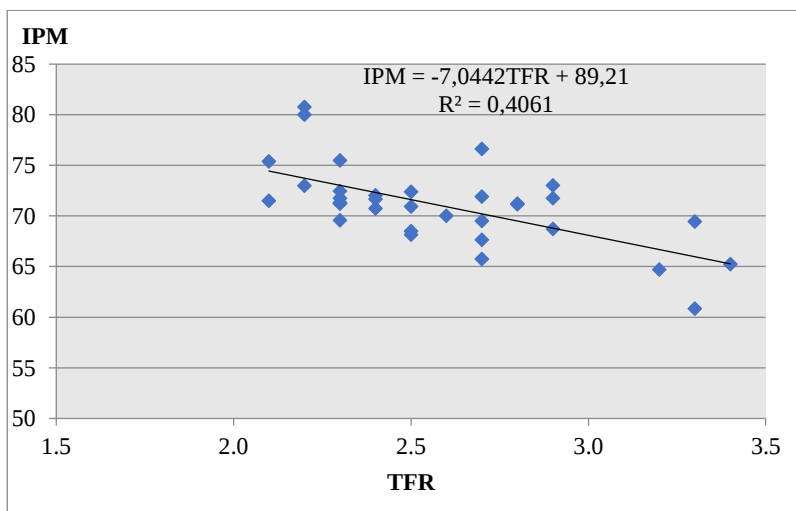
Sumber: Bappenas dkk (2018) dan covid19.go.id (Diolah oleh Penulis).

Dinamika kependudukan berhubungan erat dengan pencapaian pembangunan manusia. Tingkat kelahiran yang rendah meningkatkan kemampuan keluarga untuk membangun kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.8, di Indonesia, semakin tinggi angka

fertilitas total (TFR) di suatu provinsi, semakin rendah indeks pembangunan manusia (IPM). Kenaikan 1 anak per perempuan dalam TFR berhubungan dengan penurunan IPM sebesar 7. Jadi, penurunan tingkat kelahiran penting untuk peningkatan pencapaian pembangunan manusia.

Gambar 2.8

Angka fertilitas total (TFR) 2017 dan Indeks Pembangunan Manusia 2019 menurut provinsi Indonesia



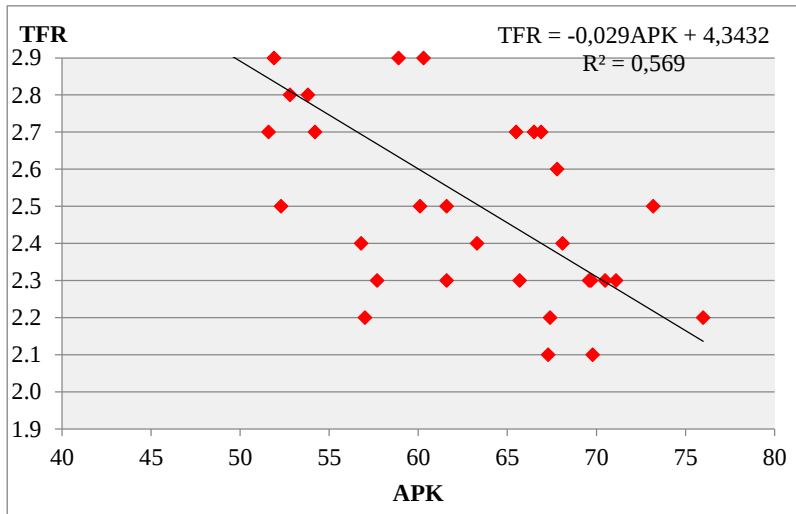
Sumber: BKKBN dkk (2018) dan www.bps.go.id (Diolah oleh Penulis).

D. Dinamika Kependudukan dan Program KB

Dinamika kependudukan berhubungan erat dengan program KB. Tingkat kelahiran lebih rendah di wilayah-wilayah yang pencapaian program KBnya lebih baik. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.9, di Indonesia, semakin tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK) di suatu provinsi, semakin rendah angka fertilitas total. Kenaikan 1 persen dalam APK berhubungan dengan penurunan angka fertilitas total sebesar 0,03 anak per perempuan atau 30 anak per 1.000 perempuan. Jadi, peningkatan prevalensi kontrasepsi penting untuk penurunan tingkat fertilitas.

Tingkat kematian lebih rendah di wilayah-wilayah yang pencapaian program KBnya lebih baik. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.10, di Indonesia, semakin tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK) di suatu provinsi, semakin rendah angka kematian bayi (IMR). Kenaikan 1 persen dalam APK berhubungan dengan penurunan IMR sebesar 0,48 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup atau 48 per 100.000 perempuan. Jadi, peningkatan prevalensi kontrasepsi penting untuk penurunan tingkat kematian.

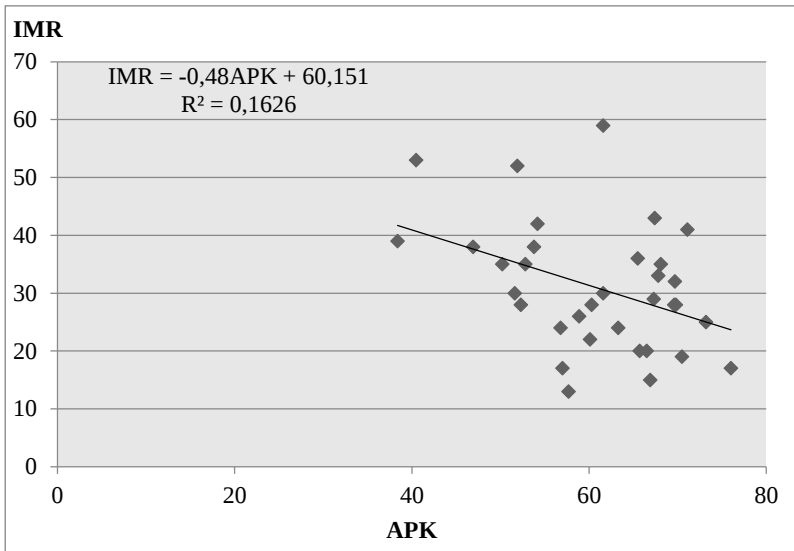
Gambar 2.9
Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan angka fertilitas total (TFR) 2017 menurut provinsi Indonesia



Sumber: BKKBN dkk (2018) (Diolah oleh Penulis).

Gambar 2.10

Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan angka kematian bayi (IMR) 2017 menurut provinsi Indonesia



Sumber: BKKBN dkk (2018) (Diolah oleh Penulis).

E. Latihan

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi ini, kerjakan soal-soal berikut ini.

1. Berikan contoh keterkaitan dinamika kependudukan dan pendidikan!
2. Berikan contoh keterkaitan dinamika kependudukan dan ekonomi!

3. Berikan contoh keterkaitan dinamika kependudukan dan kesehatan!
4. Berikan contoh keterkaitan dinamika kependudukan dan program KB!

F. Rangkuman

Pengelolaan dinamika kependudukan penting untuk meningkatkan pencapaian pembangunan dan program KB. Tingkat kelahiran yang lebih rendah akan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang dibayar (renumeratif) serta menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kurang gizi pada anak usia balita.

G. Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi ini, kerjakan soal-soal berikut:

Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang Anda anggap paling benar.

1. Dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB memiliki hubungan
 - a. Timbal balik
 - b. Terpisah
 - c. Saling berdekatan
 - d. Tak tergantikan
2. Penurunan TFR penting bagi kesejahteraan sosial, termasuk
 - a. Peningkatan pendapatan keluarga
 - b. Penurunan tingkat kematian
 - c. Peningkatan lama sekolah penduduk
 - d. Peningkatan prevalensi kontrasepsi
3. Di Indonesia, semakin tinggi tingkat kelahiran di suatu provinsi, semakin tinggi persentase penduduk miskinnya.

Hal ini menunjukkan TFR dan Kemiskinan memiliki sifat

- a. Sejalan
 - b. Saling melengkapi
 - c. Saling menggantikan
 - d. Berlawanan
4. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menurunkan tingkat fertilitas. Hal ini menggambarkan bahwa dampak pembangunan ekonomi terhadap penurunan fertilitas adalah
- a. Negatif
 - b. Netral
 - c. Positif
 - d. Tidak berdampak
5. Pembangunan ekonomi meningkatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan formal bagi perempuan sehingga akan..
- a. Menurunkan tingkat kelahiran
 - b. Meningkatkan tingkat kelahiran
 - c. Menurunkan prevalensi kontrasepsi
 - d. Meningkatkan prevalensi kontrasepsi

6. Tingkat kelahiran yang tinggi dapat membatasi kemampuan keluarga untuk memberikan gizi yang terbaik kepada anak usia bawah lima tahun (balita) sehingga dapat meningkatkan kejadian *stunting*. Maksud dari *stunting* adalah
 - a. Gizi buruk
 - b. Balita pendek
 - c. Balita kurus
 - d. Cacingan
7. Pemahaman transisi demografi penuaan penduduk penting untuk penanganan wabah COVID-19 pada masa yang akan datang melalui pemenuhan kebutuhan
 - a. Pencegahan penuaan dini
 - b. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Memiliki keturunan
 - d. Perlindungan sosial
8. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicapai melalui
 - a. Penambahan jumlah penduduk
 - b. Penurunan jumlah penduduk
 - c. Penurunan tingkat kelahiran
 - d. Penambahan tingkat kematian

9. Tingkat kelahiran lebih rendah di wilayah-wilayah yang pencapaian program KBnya
- a. Rendah
 - b. Tinggi
 - c. Sedang
 - d. Tidak ada hubungan
10. Peningkatan prevalensi kontrasepsi penting untuk
- a. Penurunan tingkat fertilitas dan tingkat kematian
 - b. Penurunan tingkat fertilitas dan peningkatan Kesehatan
 - c. Peningkatan kesehatan dan kebahagiaan keluarga
 - d. Penurunan tingkat fertilitas dan tingkat migrasi

Soal Esai

Buatlah suatu esai (satu halaman) mengenai keterkaitan antara dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB di wilayah Anda.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kunci jawaban Evaluasi (Pilihan Ganda)

1. A
2. C
3. D
4. C
5. A
6. B
7. D
8. C
9. B
10. A

BAB III

PROGRAM KB DAN PEMBANGUNAN

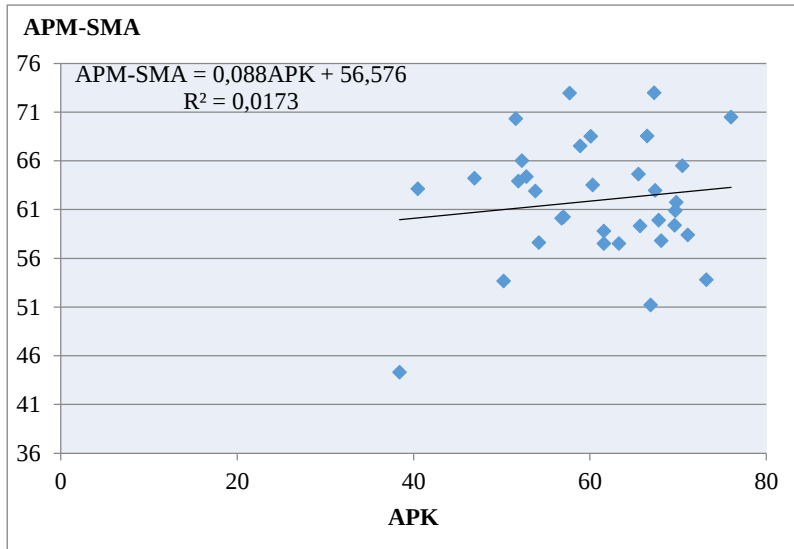
Indikator keberhasilan: Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menjelaskan keterkaitan program KB dan pembangunan.

A. Program KB dan Pendidikan

Program KB berhubungan erat dengan pencapaian pembangunan. Pencapaian pembangunan pendidikan lebih baik di wilayah-wilayah yang pencapaian program KBnya lebih baik. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.1, di Indonesia, semakin tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK) di suatu provinsi, semakin tinggi angka partisipasi murni SMAny. Kenaikan 1 persen dalam APK berhubungan dengan kenaikan angka partisipasi murni SMA sebesar 0,09. Jadi, peningkatan prevalensi kontrasepsi penting untuk peningkatan pencapaian pendidikan menengah.

Gambar 3.1

Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan lama sekolah rata-rata (Sekolah) 2019 menurut provinsi Indonesia menurut provinsi Indonesia



Sumber: BKKBN dkk (2018) (Diolah oleh Penulis).

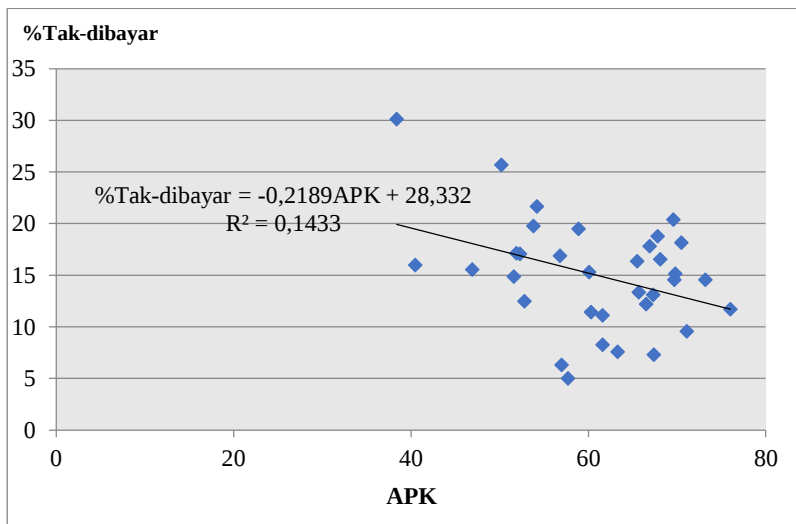
B. Program KB dan Ekonomi

Program KB memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, termasuk kesempatan kerja yang dibayar (numeraif). Pencapaian pembangunan ekonomi lebih baik di wilayah-wilayah yang pencapaian program KBnya lebih baik. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.2, di Indonesia, semakin

tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK) di suatu provinsi, semakin rendah persentase pekerja keluarga/tidak dibayar. Kenaikan 1 persen dalam APK berhubungan dengan penurunan persentase pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 0,22. Jadi, peningkatan prevalensi kontrasepsi penting untuk pengentasan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Gambar 3.2

Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan persentase pekerja keluarga/tidak dibayar (%Tak-dibayar) 2019 menurut provinsi Indonesia

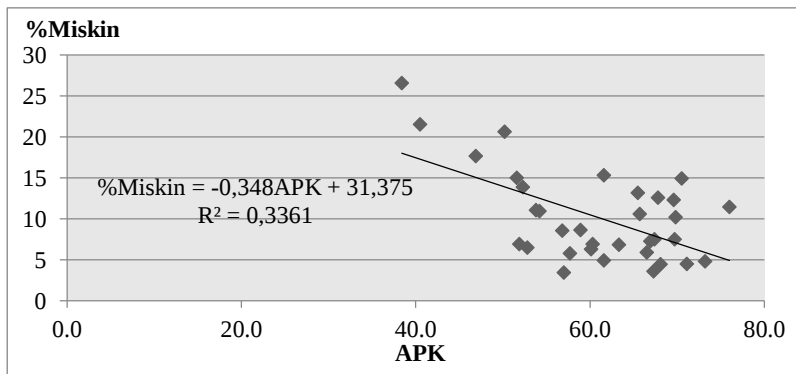


Sumber: BKKBN dkk (2018) dan BPS (2019) (Diolah oleh Penulis).

Pencapaian pengentasan kemiskinan lebih baik di wilayah-wilayah yang pencapaian program KBnya lebih baik. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.3, di Indonesia, semakin tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK) di suatu provinsi, semakin rendah persentase penduduk miskin. Kenaikan 1 persen dalam APK berhubungan dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,35. Jadi, peningkatan prevalensi kontrasepsi penting untuk pengentasan kemiskinan.

Gambar 3.3

Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan persentase penduduk miskin (%Miskin) 2019 menurut provinsi Indonesia

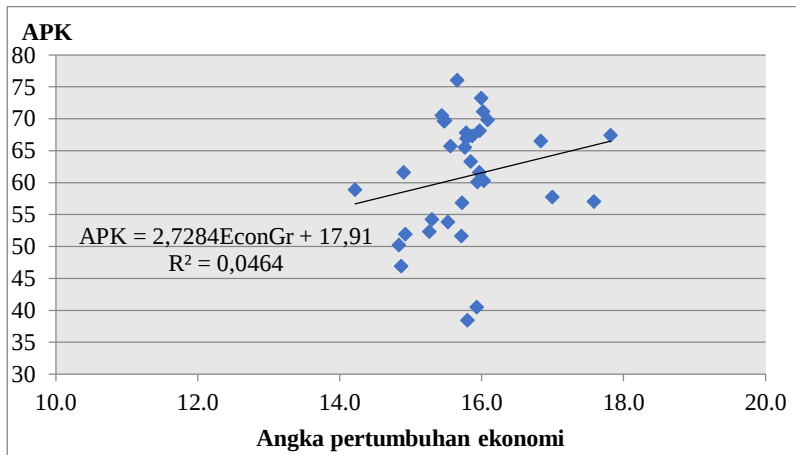


Sumber: BKKBN dkk (2018) dan www.bps.go.id (Diolah oleh Penulis).

Pembangunan ekonomi berdampak positif terhadap pencapaian program KB. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.4, di Indonesia, semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi, semakin tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK)nya. Kenaikan 1 persen dalam angka pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan kenaikan APK sebesar 2,7. Jadi, peningkatan pencapaian pembangunan ekonomi penting bagi peningkatan prevalensi kontrasepsi.

Gambar 3.4

Angka pertumbuhan ekonomi 2011 dan angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 menurut provinsi Indonesia



Sumber: BKKBN dkk (2018) dan INDODAPOER (databank.worldbank.org) (Diolah oleh Penulis).

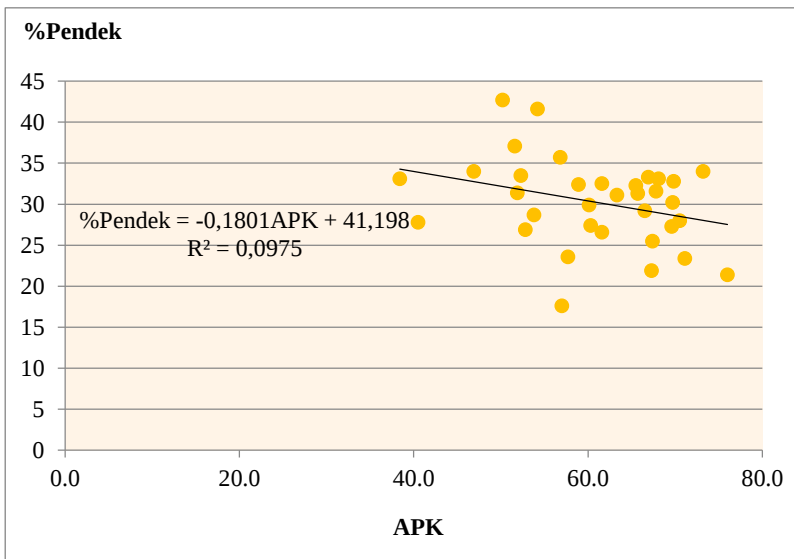
C. Program KB dan Kesehatan

Pencapaian program KB berhubungan erat dengan pencapaian pembangunan kesehatan. Ber-KB meningkatkan kemampuan keluarga untuk memberikan gizi yang terbaik untuk anak usia bawah lima tahun (balita) sehingga menurunkan kejadian *stunting*. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.5, di Indonesia, semakin tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK) di suatu provinsi, semakin rendah persentase anak usia balita pendek (*stunted*). Kenaikan 1 persen dalam APK berhubungan dengan penurunan dalam persentase anak usia balita pendek sebesar 0,18%. Jadi, program KB penting untuk pengentasan *stunting*.

Pencapaian program KB berhubungan erat dengan pencapaian pembangunan manusia. Ber-KB meningkatkan kemampuan keluarga untuk membangun kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.6, di Indonesia, semakin tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK) di suatu provinsi, semakin tinggi indeks pembangunan manusia (IPM). Kenaikan 1 persen dalam APK berhubungan dengan

kenaikan IPM sebesar 0,22. Jadi, program KB penting untuk peningkatan pencapaian pembangunan manusia.

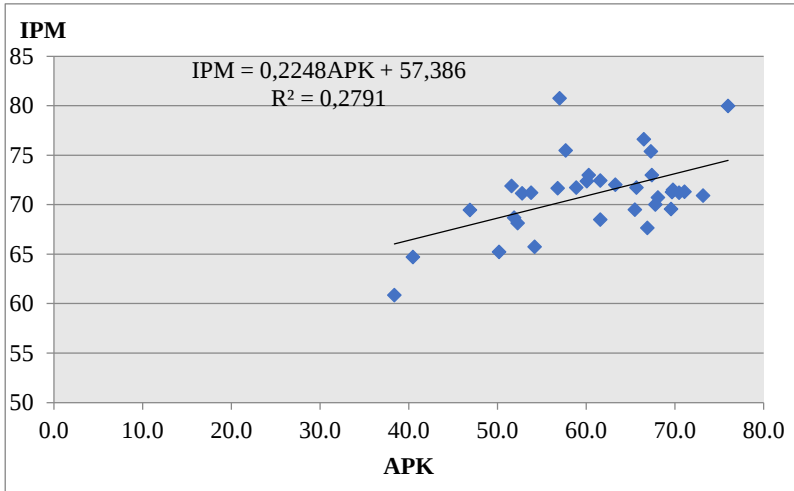
Gambar 3.5
Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan persentase
anak usia balita pendek (%Pendek) 2018 menurut
provinsi Indonesia



Sumber: BKKBN dkk (2018) dan Kementerian Kesehatan (2018) (Diolah oleh Penulis).

Gambar 3.6

Angka prevalensi kontrasepsi (APK) 2017 dan Indeks Pembangunan Manusia 2019 menurut provinsi Indonesia



Sumber: BKKBN dkk (2018) dan www.bps.go.id (Diolah oleh Penulis).

D. Latihan

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi ini, kerjakan soal-soal berikut ini.

1. Berikan contoh keterkaitan antara program KB dan pembangunan pendidikan!
2. Berikan contoh keterkaitan antara program KB dan pembangunan ekonomi!

3. Berikan contoh keterkaitan antara program KB dan pembangunan kesehatan!

E. Rangkuman

Program KB berhubungan erat dengan pencapaian pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pencapaian pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan lebih baik di provinsi-provinsi dengan pencapaian program KB yang lebih baik.

F. Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi ini, kerjakan soal-soal berikut:

Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang Anda anggap paling benar.

1. Program KB berhubungan erat dengan pencapaian pembangunan
 - a. Pendidikan
 - b. Ekonomi

- c. Kesehatan
 - d. Kebahagiaan
2. Pencapaian pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan lebih baik di provinsi-provinsi dengan pencapaian program KB yang
- a. Lebih baik
 - b. Standar
 - c. Buruk
 - d. Tidak tahu
3. Peningkatan prevalensi kontrasepsi pencapaian pendidikan menengah
- a. Meningkatkan
 - b. Menurunkan
 - c. Tidak mempengaruhi
 - d. Tidak berhubungan dengan
4. Bagaimana pengaruh tingginya APK terhadap persentase pekerja keluarga/tidak dibayar di Indonesia
- a. Semakin tinggi
 - b. Sama saja
 - c. Semakin rendah
 - d. Tidak tahu

5. Bagaimana dampak pembangunan ekonomi terhadap pencapaian program KB
 - a. Negatif
 - b. Positif
 - c. Tidak berpengaruh
 - d. Tidak tahu
6. Berdasarkan pernyataan di atas, ketika pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi negatif, maka pencapaian program KB akan
 - a. Negatif
 - b. Positif
 - c. Tidak berpengaruh
 - d. Tidak tahu
7. Manakah pernyataan dibawah ini yang merupakan pernyataan yang benar
 - a. Program KB dan *stunting* tidak berhubungan
 - b. Program KB penting untuk pengentasan *stunting*
 - c. Pengentasan *stunting* mempengaruhi program KB
 - d. Program pengentasan *stunting* dan KB merupakan hal yang berbeda
8. Ber-KB meningkatkan kemampuan keluarga untuk membangun kualitas sumber daya manusia, terutama

- a. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
 - b. Pendidikan, tenaga kerja, dan ekonomi
 - c. Pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan
 - d. Pendidikan, ekonomi, dan tenaga kerja
9. Data di Indonesia menunjukkan bahwa suatu provinsi memiliki persentase anak usia balita pendek (*stunted*) rendah ketika provinsi tersebut
- a. APKnya rendah
 - b. APKnya sedang
 - c. APKnya tinggi
 - d. APKnya tetap
10. Data di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi angka prevalensi kontrasepsi (APK) di suatu provinsi, maka
- a. Semakin rendah indeks pembangunan manusia (IPM)
 - b. Semakin negatif indeks pembangunan manusia (IPM)
 - c. Semakin melandai indeks pembangunan manusia (IPM)
 - d. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia (IPM)

Soal Esai

Buatlah suatu esai (satu halaman) tentang tingkat, tren, pola dan perbedaan, serta determinan mortalitas di wilayah Anda.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kunci jawaban Evaluasi (Pilihan Ganda)

1. D
2. A
3. A
4. C
5. B
6. A
7. B
8. A
9. C
10. D

BAB IV

PENUTUP

Selamat! Anda telah mempelajari mata diklat “Dinamika Kependudukan, Pembangunan, dan Program KB” dengan sukses. Selanjutnya, untuk mengakhiri modul ini, Anda dipersilakan untuk mencermati sekali lagi rangkuman yang merupakan intisari mortilitas.

A. Rangkuman

Pengelolaan dinamika kependudukan penting untuk meningkatkan pencapaian pembangunan dan program KB. Tingkat kelahiran yang lebih rendah akan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang dibayar (renumeratif), angka pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian pembangunan manusia serta menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kurang gizi pada anak usia balita.

Progam KB berhubungan erat dengan pencapaian pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pencapaian pembangunan pendidikan, ekonomi, dan

kesehatan lebih baik di provinsi-provinsi dengan pencapaian program KB yang lebih baik.

B. Evaluasi

Buatlah suatu esai (satu halaman) tentang keterkaitan antara dinamika kependudukan, pembangunan, dan program KB di wilayah Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2009. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga. Jakarta, Indonesia.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2012. Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
Jakarta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan,
dan ICF. 2018. Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia 2017. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Keadaan Angkatan Kerja di
Indonesia Februari 2019. Jakarta, Indonesia.
- House, W.J. 1995. Integrating population factors in
development planning. Pacific Health Dialog. Vol. 2.
No.1. Original Papers.
- Kementerian Kesehatan. 2018. Laporan Nasional Riskesdas
2018. Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Literasi

Dinamika Kependudukan dan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 serta Pemanfaatannya untuk Perencanaan Pembangunan Daerah. Penulis: Omas Bulan Samosir.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2018. Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. BAPPENAS: Jakarta.

United Nations (UN). 1995. Report of the International Conference on Population and Development. Cairo, 5-13 September 1994. New York, USA.

www.bps.go.id

<https://databank.worldbank.org/source/indonesia-database-for-policy-and-economic-research>